1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

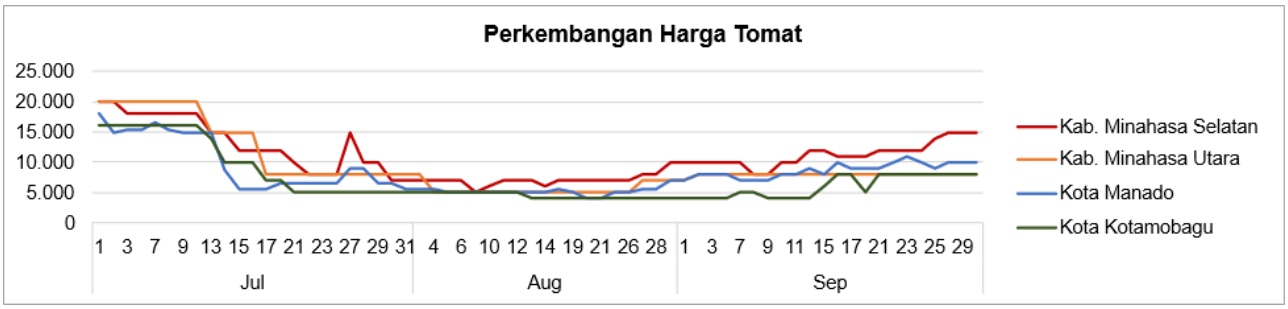
   Pada Triwulan III 2026, tingkat inflasi *month-to-month* (m-to-m) Provinsi Sulawesi Utara pada akhir triwulan (September 2026) tercatat mengalami lonjakan sebesar 3,53%, sementara inflasi *year-to-date* (y-to-d) berada di angka 7,35%, dan inflasi *year-on-year* (y-o-y) menyentuh 7,59%.

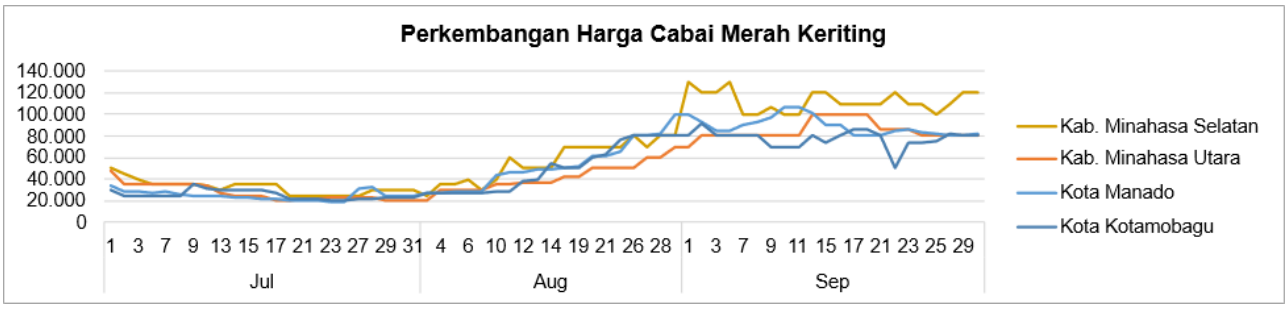
   Berdasarkan empat kabupaten/kota pencatatan IHK di Sulawesi Utara, seluruh wilayah mengalami tekanan inflasi secara bulanan maupun tahunan pada akhir Triwulan III ini. Secara bulanan (m-to-m), Kabupaten Minahasa Utara mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,50% (pendorong utama: cabai rawit 3,20%; penahan: bawang merah -0,06%), diikuti Kota Kotamobagu sebesar 3,61% (pendorong utama: cabai rawit 2,62%; penahan: ikan cakalang/ikan sisik -0,06%), Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 3,12% (pendorong utama: cabai rawit 1,48%; penahan: daun bawang -0,16%), dan Kota Manado sebesar 3,02% (pendorong utama: cabai rawit 1,40%; penahan: angkutan udara -0,05%).

   Sementara itu, secara tahunan (y-on-y), tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 9,05% dengan andil pendorong utama dari cabai rawit (3,96%) dan penahan berupa beras (-0,42%). Kabupaten Minahasa Selatan membukukan inflasi y-o-y sebesar 7,47% (pendorong utama: cabai rawit 2,07%; penahan: bawang merah -0,15%), disusul Kota Manado sebesar 7,32% (pendorong utama: cabai rawit 1,73%; penahan: sabun mandi -0,05%), dan Kota Kotamobagu sebesar 6,49% (pendorong utama: cabai rawit 2,77%; penahan: bawang merah -0,09%).

   Secara agregat tahun ke tahun (y-o-y) provinsi, komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar pada akhir triwulan III ini meliputi cabai rawit (2,28%), angkutan udara (0,47%), emas perhiasan (0,42%), daun bawang (0,30%), dan kangkung (0,29%). Sebaliknya, komoditas yang menjadi penahan laju inflasi tahunan antara lain bawang merah (-0,06%), daging babi (-0,03%), sabun mandi (-0,03%), beras (-0,03%), dan kemeja pendek katun pria (-0,02%).

   Untuk komoditas yang memicu lonjakan inflasi bulanan (m-to-m) secara signifikan didominasi oleh cabai rawit dengan andil mencapai 1,84%, disusul oleh tomat (0,26%), cabai merah (0,15%), ikan selar/ikan tude (0,13%), dan kangkung (0,10%). Adapun kelompok komoditas yang berfungsi sebagai penahan inflasi bulanan meliputi angkutan udara (-0,03%), bawang merah (-0,02%), minyak goreng (-0,02%), sabun detergen bubuk (-0,01%), dan emas perhiasan (~0%).



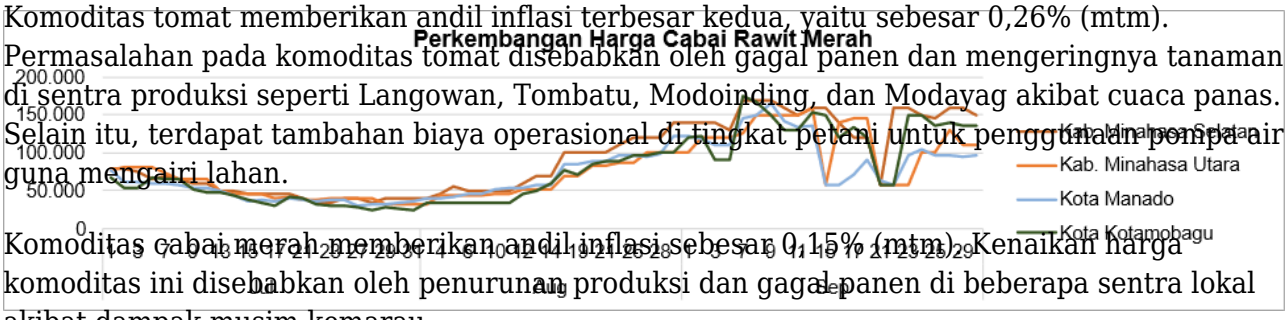


2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan tekanan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada akhir Triwulan III dipicu oleh gangguan pasokan pada beberapa komoditas pangan utama akibat faktor cuaca, musim kemarau, keterbatasan hasil tangkap perikanan, dan peningkatan biaya operasional produksi.

Komoditas cabai rawit menjadi pendorong utama inflasi dengan memberikan andil sebesar 1,84% (mtm). Kenaikan ini disebabkan oleh gagal panen dan berkurangnya pasokan dari sentra produksi di Sulawesi Utara serta Gorontalo akibat kekeringan berkepanjangan. Kondisi tersebut terjadi di tengah permintaan masyarakat yang tetap tinggi sehingga mengurangi ketersediaan stok di pasar lokal.

Komoditas tomat memberikan andil inflasi terbesar kedua, yaitu sebesar 0,26% (mtm). Permasalahan pada komoditas tomat disebabkan oleh gagal panen dan mengeringnya tanaman di sentra produksi seperti Langowan, Tombatu, Modoinding, dan Modayag akibat cuaca panas. Selain itu, terdapat tambahan biaya operasional di tingkat petani untuk penggunaan pompa air guna mengairi lahan.



Komoditas cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,15% (mtm). Kenaikan harga komoditas ini disebabkan oleh penurunan produksi dan gagal panen di beberapa sentra lokal akibat dampak musim kemarau.

Komoditas ikan selar/ikan tude memberikan andil inflasi sebesar 0,13% (mtm). Kenaikan harga pada komoditas perikanan ini disebabkan oleh kondisi perairan yang kurang kondusif, seperti

angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Sulawesi Utara, yang membatasi aktivitas melaut nelayan dan mengurangi pasokan ikan di pasar.

Komoditas kangkung memberikan andil inflasi sebesar 0,10% (mtm). Kenaikan harga kangkung dipengaruhi oleh terganggunya budidaya akibat penurunan debit air pada sumber air dan lahan pertanian selama musim kemarau.

Tingginya tingkat inflasi di Sulawesi Utara juga dipengaruhi oleh struktur pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan Diagram Timbang Survei Biaya Hidup 2022, komoditas-komoditas pendorong utama inflasi memiliki bobot konsumsi daerah yang lebih tinggi dibandingkan bobot nasional seperti cabai rawit (1,07%) sekitar 3,2 kali lipat dari nasional (0,33%), tomat (0,59%) sekitar 2,5 kali lipat dari nasional (0,23%), ikan selar/tude (0,76%) sekitar 13 kali lipat dari nasional (0,23%), serta kangkung (0,30%) sekitar 1,6 kali dari nasional (0,18%).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang Triwulan III 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara bersama TPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara secara aktif mengimplementasikan berbagai program intervensi strategis. Langkah-langkah pengendalian tersebut diintegrasikan secara komprehensif melalui kerangka kerja strategi 4K, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Keterjangkauan Harga (K1): Dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga retail, TPID melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 55 kali kegiatan di berbagai wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Selain itu, dilakukan penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 26 ton kepada 881 penerima di Kota Manado serta bantuan beras 30 kg/KK untuk periode 3 bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diiringi pemantauan harga dan pasokan pangan secara berkala di pasar-pasar IHK.
- Ketersediaan Pasokan (K2): Guna memitigasi dampak kekeringan dan defisit pasokan hortikultura, dilakukan penambahan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp1 Miliar untuk program teknis petani mencakup pengadaan pompa air dan fasilitas irigasi. TPID juga mengoptimalkan penyerahan bantuan pakan ternak di Bolmong Utara, penguatan penyerapan beras petani lokal oleh Bulog SulutGo hingga 91% dari target, penyaluran bantuan alsintan dan saprotan Bank Indonesia ke 9 kelompok tani, serta gerakan tanam cabai rawit kolaborasi BI dan PKK Minahasa Selatan.
- Kelancaran Distribusi (K3): Untuk mengatasi keterbatasan pasokan lokal, TPID memperkuat keandalan pasokan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit dari Probolinggo sebanyak 2,4 ton pada 14 September 2026 dan 2,5 ton pada 20 September 2026 yang disalurkan langsung ke pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota IHK.
- Komunikasi Efektif (K4): Penguatan koordinasi ditempuh melalui High Level Meeting (HLM) TPID Kab. Bolaang Mongondow Utara, Rapat Koordinasi FDP lintas daerah, pelatihan hilirisasi produk Barito (Bawang, Rica, Tomat) menjadi aneka saus dan sambal, serta Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk mendorong diversifikasi konsumsi dan pemanfaatan pangan lokal.

Sebagai rincian dari implementasi strategi di atas, berikut disajikan rangkuman rangkaian upaya konkret pengendalian inflasi yang dijalankan secara berkala dari bulan Juli hingga September 2026:

Upaya Pengendalian Inflasi Juli 2026

- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Madidir Weru dan Kel. Madidir Unet, Kota Bitung, 1 Juli 2026
- Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kab. /Kota se-Sulawesi Utara membahas Upaya Konkret Pengendalian Harga Beras, 2 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Wangurer Timur dan Kel. Wangurer Barat, Kota Bitung, 7 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Suluun Empat, Desa Tumpaan Satu dan Kel. Kawangkoan Bawah, Kab. Minsel, 10 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Lemoh Raya, Desa Lolah Raya dan Desa Ranotongkor Raya, Kab. Minahasa, 14 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Tombatu, Desa Silia Kota dan Desa Kalait 1, Kab. Minahasa Tenggara, 16 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Mundung, Desa Liwutung dan Kel. Tosuraya, Kab. Minahasa Tenggara, 17 Juli 2026
- Rapat Evaluasi Penyaluran CPP Beras SPHP, 20 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Sawangan, Desa Koka, Desa Suluan, Sasaran, dan Lapangan God Bless, Kab. Minahasa, 22 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Paslaten, Desa Kaweng, Desa Sendangan, Kel. Wawalintouan, dan Kel. Paleloan, Kab. Minahasa, 24 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Kembes Satu, Desa Rumengkor Satu, Desa Tombasian Atas, Desa Koha dan Desa Atep Satu, Kab. Minahasa, 25 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Rumengkor Dua, Desa Tombuluan, dan Desa Kamangta, Kab. Minahasa, 24 Juli 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Gereja Katolik Stella Maris Kel. Kadoodan, Kota Bitung, 28 Juli 2026
- Monitoring harga pasar harian oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kab. /Kota

Upaya Pengendalian Inflasi Agustus 2026

- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulawesi Utara, 20 Agustus 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Tematik Pengucapan Syukur di Kec. Paal Dua, Kec. Bunaken, dan Kec. Wanea, Kota Manado, 22 Agustus 2026
- Monitoring harga pasar harian oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kab. /Kota

Upaya Pengendalian Inflasi September 2026

- Rapat Koordinasi Pembahasan Upaya Pengendalian Inflasi Cabai, 2 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Tuutu dan Desa Touliang Oki, Kab. Minahasa, 2 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Batu Putih Atas dan Kel. Girian Weru Dua, Kota Bitung, 2 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kantor Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut, Kantor TP-PKK Prov. Sulut dan Kios Nyiur Pumorow, Kota Manado, 2 September 2026
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi membahas langkah strategis pengendalian inflasi cabai di Kab/Kota se-Sulut, 3 September 2026
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi membahas penyaluran cabai hasil FDP di Kota

Manado, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Utara, 4 September 2026
- Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Inflasi Prov. Sulawesi Utara, 8 September 2026
- High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Bolaang Mongondow Utara, 8 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Lahendong dan Kel. Uluindano, Kota Tomohon, 8 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kantor Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut, Kantor TP-PKK Prov. Sulut dan Kios Nyiur Pumorow, Kota Manado, 8 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Matani Dua, Kel. Matani Tiga, Kel. Paslaten Dua dan Desa Rurukan Satu, Kota Tomohon, 9 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kel. Woloan Dua, Desa Taratara, Kel. Talete Dua dan Kel. Kakaskasen, Kota Tomohon, 10 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Kantor Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut dan Kios Nyiur Pumorow, Kota Manado, 8 September 2026
- Rapat Koordinasi FDP Cabai Rawit dan GPM Desa Kelurahan, 10 September 2026
- Fasilitasi Distribusi Pangan Cabai Rawit dari Probolinggo sebanyak 2,4 ton, 15 September 2026
- Penjualan Cabai Rawit hasil FDP di Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan di Manado, Pasar Airmadidi di Minahasa Utara serta Pasar Amurang di Minahasa Selatan, 15 dan 16 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Tematik dalam rangka HUT Ke-62 Pemprov Sulut di GMIM Sion, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, 18 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Tematik dalam rangka HUT Ke-62 Pemprov Sulut di GMIM Sion, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, GMIM Betel Teling Atas, RRI Manado, GMIM Pinaesaan, Halaman Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut dan Kios Nyiur Pumorow, Kota Manado, 18 September 2026
- Fasilitasi Distribusi Pangan Cabai Rawit dari Probolinggo sebanyak 2,5 ton, 21 September 2026
- Penjualan Cabai Rawit hasil FDP di Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan di Manado, Pasar 23 Maret di Kotamobagu, Pasar Airmadidi di Minahasa Utara serta Pasar Amurang di Minahasa Selatan, 21 September 2026
- Gerakan Pangan Murah (GPM) Tematik dalam rangka HUT Ke-62 Pemprov Sulut di GMIM Zaitun Karombasan, Kec. Ranotana Weru dan Pelabuhan Manado, Kec. Wenang, Kota Manado, 25 September 2026
- Monitoring harga pasar harian oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kab. /Kota

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara pada Triwulan III Tahun 2026 menghadapi tantangan berat akibat faktor cuaca. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi tahunan (y-on-y) pada bulan September 2026 yang mencapai 7,59%, melebihi target sasaran nasional. Kenaikan harga bulanan sebesar 3,53% (m-to-m) pada September 2026 terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan cabai rawit, tomat, dan cabai merah akibat musim kemarau panjang yang memicu gagal panen di sentra produksi lokal maupun Gorontalo.

Di tengah keterbatasan pasokan tersebut, langkah penanganan cepat oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Bank Indonesia membantu menahan lonjakan harga agar tidak semakin

tinggi. Pengiriman bantuan pasokan cabai rawit dari Probolinggo sebanyak 4,9 ton yang disalurkan langsung ke pasar-pasar utama—seperti Pasar Bersehati, Karombasan, Airmadidi, Amurang, dan Pasar 23 Maret Kotamobagu—membantu menambah stok di tingkat pedagang. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 55 kali selama bulan September serta penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan juga membantu menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Dari sisi produksi, upaya bantuan di tingkat petani masih perlu dipercepat, terutama terkait pengairan lahan. Penambahan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp1 Miliar untuk bantuan pompa air dan fasilitas irigasi menjadi langkah penting, mengingat ketergantungan pasokan pada satu-dua daerah sentra membuat harga mudah melonjak saat terjadi kemarau. Sementara itu, harga tiket pesawat yang sempat turun secara bulanan pada bulan September membantu menahan laju inflasi, meskipun secara tahunan kontribusinya masih cukup tinggi (0,47%) akibat besarnya bobot konsumsi masyarakat Sulawesi Utara.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Melakukan percepatan penambahan pasokan untuk komoditas cabai rawit, tomat, dan cabai merah melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Kerjasama Antar Daerah (KAD), khususnya dari wilayah sentra produksi yang masih surplus dan tidak terdampak kekeringan. Pelaksanaan intervensi perlu menerapkan prinsip 4T (Tepat Lokasi, Tepat Sasaran, Tepat Komoditas, dan Tepat Waktu) pada wilayah yang mengalami kenaikan harga dan defisit pasokan tertinggi.
    - Mempercepat langkah penanganan kekeringan di kawasan sentra produksi hortikultura melalui pemanfaatan pompa air, optimalisasi sumber air alternatif, pengaturan distribusi air secara bergilir, bantuan sarana pengairan, serta percepatan perbaikan jaringan irigasi. Langkah ini diprioritaskan pada lokasi yang masih memiliki tanaman produktif untuk mencegah meluasnya gagal panen dan menjaga sisa hasil produksi.
    - Melakukan pemetaan menyeluruh terkait luas lahan terdampak kekeringan, luas area gagal panen, estimasi hasil panen, kebutuhan air, serta proyeksi ketersediaan pasokan 1 hingga 3 bulan ke depan. Pemetaan ini difokuskan pada sentra cabai rawit, tomat, dan cabai merah di Sulawesi Utara maupun wilayah pemasok seperti Gorontalo sebagai dasar pelaksanaan FDP, KAD, dan penyaluran sarana produksi.
    - Mengidentifikasi daerah surplus alternatif dan memperkuat KAD, baik antarwilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) maupun dengan daerah di luar Sulampua. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua wilayah sentra pasokan utama yang sedang mengalami penurunan produksi akibat kemarau.
    - Memperkuat pemantauan pasokan komoditas perikanan, khususnya ikan selar, melalui pemantauan kondisi cuaca perairan, jumlah hasil tangkapan, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi. Selain itu, perlu diidentifikasi sumber pasokan alternatif jika kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi masih membatasi aktivitas melaut nelayan, guna mencegah tekanan harga meluas ke komoditas ikan.
    - Meningkatkan pemantauan harga dan pengawasan jalur distribusi di pasar bersama Satgas Saber Pangan untuk memastikan kewajaran harga serta mencegah penimbunan. Di samping itu, perlu diperkuat kampanye belanja bijak, diversifikasi konsumsi pangan lokal, dan imbauan stop boros pangan untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat.